

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas wilayah laut kabupaten berkaitan dengan penangkapan ikan di Madura, selain itu juga untuk mengetahui maksud dari pengaturan batas wilayah laut kabupaten menurut peraturan undang-undang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif atau penulisan hukum kepustakaan. Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian batas wilayah laut kabupaten berkaitan dengan penangkapan ikan di Madura.

Kata kunci: Batas Wilayah Laut Dan Penangkapan Ikan Bagi Nelayan.

ABSTRACT

This study aimed to analyze the sea boundaries with regard to fishing district in Madura, and also to determine the intent of setting sea boundaries districts according to rule of law. This study is a normative legal research or legal writing literature. Namely legal research done by researching library materials or secondary data, ie data obtained from the research and study of library materials. The materials are arranged in a systematic, studied then drawn a conclusion to the problems examined. The results of the study sea boundaries with regard to fishing district in Madura.

Keywords: Boundary Sea region and fish catching For Fishermen.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama perkenalkanlah penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena hanya dengan Rhido-nya lah skripsi dengan berjudul **“BATAS WILAYAH LAUT KABUPATEN BERKAITAN DENGAN PENANGKAPAN IKAN DI MADURA”** dapat diselesaikan dengan lancar.

Dan tidak lupa pula shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang terang benerang seperti yang telah kita rasakan saat ini.

Dengan ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karna terbatasnya pengetahuan, refrensi, waktu dan pemahaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan nanti. Dalam menyusun skripsi in penulis sangat banyak memperoleh bantuan, dorongan, bimbingan dan saran dari berbagai phak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenalkanlah penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya, penghargaan dan rasa hormat setinggi-tingginya kepada:

1. **Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H.** selaku dekan fakultas hukum dan segenap jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura.
2. **Mukhlis, S.H., M.H.** selaku ketua program studi fakultas hukum Universitas Trunojoyo Madura.
3. **R. Wahjoe Poernomo S, S.H., M.H.** selaku Ketua Konsentrasi HTN/HAN Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
4. Dewan penguji yang telah memberikan masukan-masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu staf pengajar program Studi Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan bekal yang sangat berharga selama penulis mengikuti pendidikan.
6. Bapak dan Ibu staf tata usaha program Studi Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah membantu penulis selama mengikuti pendidikan.
7. Keluarga besar **HMK Pemerintahan** Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang selalu mendukung.
8. Semua teman-teman dan sahabat-sahabatku Ela Sindhi Pradhita, Hendri, Doni Bastian, Achmad Idris, Sofa Wahyudi, Nurholis Auton, Rosik, Farid Turmidzi, Wahyu Erfani, Jakfar, Itfi Bareno, Martin, Triyas, Komeng, Samsul dan semua teman-teman Fakultas Hukum tercinta. Terima kasih atas kebersamaannya dan dukungannya semoga kita menjadi orang yang bermanfaat.
9. Semua pihak yang telah dengan serius memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan akrawala ilmu dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya serta sebagai dharma bakti penulis kepada almamater tercinta.

Bangkalan, Juni 2016
Penulis

Farid alfatoni febrianto
Nim : 11.01.111.00.119

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
1.4.1. Manfaat Teoritis	3
1.4.2. Manfaat Praktis	4
1.5. Keaslian	4
1.6. Metode Penelitian	4
1.6.1. Jenis Penelitian	4
1.6.2. Metode Pendekatan	5
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	6

BAB II Hukum Laut, Batas Wilayah Laut, Penangkapan Ikan Dan Otonomi Saerah.....	8
2.1. Kewenangan Pemerintah Daerah Atas Pengelolaan Laut Dan Batas Wilayah Laut Di Daerah	8
2.1.1. Penetapan Garis Pantai Dan Garis Pangkal.....	10
2.2.1. Penetapan Garis Pangkal.....	11
2.2. Otonomi Daerah	12
2.2.1. Pengertian Otonomi Daerah.....	12
2.2.2. Desentralisasi.....	14
2.2.3. Dekonsentrasi.....	15
2.3. Hukum Laut	17
2.3.1. Laut Territorial Dan Zona Tambahan.....	17
2.3.2. ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif)	19
2.3.3. Laut Lepas.....	20
2.4. Penangkapan Ikan	21
2.4.1. Pengertian Penangkapan Ikan	21
2.4.2. Izin Usaha Perikanan (SIUP)	24
2.4.3. Izin Penangkapan Ikan (SIPI).....	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
3.1. Pengaturan Batas Wilayah Laut Kabupaten Menurut Peraturan Undang-Undang	27
3.1.1. Pengaturan Batas Wilayah Laut.....	27
3.1.2. Prinsip Pokok Pemerintahan Daerah	30
3.1.3.Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam.....	38
3.1.4.Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil	41
3.4. Pengaturan Penangkapan Ikan.....	45
3.4.1. Pengertian Penangkapan Ikan.....	45

3.4.2. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 05 Tahun	
2008 Tentang Usaha Perikanan Tangkap.....	51
3.4.3. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor	
Per02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan	
Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu	
Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik	
Indonesia.	54
Bab IV PENUTUP	62
4.1. Kesimpulan	62
4.2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64